ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KINERJA PEMDA DALAM MENGELOLA KEUANGAN DAERAHNYA

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat

Guna mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

RYAN SARI OKTAVINA

01003130005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI

INDRALAYA

2006

S
352.1207
Okt
a
2006

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KINERJA PEMDA DALAM MENGELOLA KEUANGAN DAERAHNYA

19329 / 14690

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
Guna mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
RYAN SARI OKTAVINA
01003130005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
INDRALAYA
2006

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: RYAN SARI OKTAVINA
NIM	: 01003130005
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH POKOK	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD KABUPATEN LAHAT SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KINERJA PEMDA DALAM MENGELOLA KEUANGAN DAERAHNYA

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL 20/05 2006 KETUA PANITIA

Drs. TANZIL DJUNAIDI, SE, AK

TANGGAL 22/05 2006 ANGGOTA PANITIA

MUKTHARUDDIN, SE, MSI, AK

MOTTO :

" DOA, USAHA DAN TAWAKAL KEPADA ALLAH ADALAH KUNCI MENUJU KEBERHASILAN"

Kupersembahkan Kepada:

Papa dan Mama Tersayang

Ayuk (Ryan AP, ST), K'ndi (Ryan Andrey, SP) yang kusayangi

Teman Sejatiku

Almamaterku

BISMILLAHIRROHMANNIRROHIIM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang " **Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Lahat Sebelum dan Sesudah Pemekaran sebagai alat untuk Menilai Kinerja PEMDA dalam Mengelola Keuangan Daerahnya"**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kelemahan,kekurangan dan kesalahan baik dalam materi maupun penyajiannya, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk meningkatkan mutu tulisan dikemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari dukungan dan bantuan baik material maupun spritual, karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Syamsurijal,AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dra. Rina Tjandrakirana,MM,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Tanzil Djunaidi,Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.
5. Bapak Muktharuddin, SE,MSI,Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.
6. Ibu Luk luk Fuadah, SE,Ak,MBA selaku Dosen Penguji Tamu.
7. Ibu Yulia Saftiana, SE,MSI,Ak selaku Dosen penguji pengganti Bapak Mukhtaruddin SE,MSI,Ak. Bu makasih banyak atas sarannya, ibu memang baik banget, hanya Allah yang bisa membalasnya,amin.
8. Ibu Dra.Hj. Naisyah Siregar,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademikku.

9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, terima kasih buat Yuk Al, Pak Heru, Pak Tutur dll, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
11. Teman-teman seperjuanganku angkatan "00".
12. Buat adik-adik angkatan "02",Vita makasih sudah bantu ayuk cari informasi dan pengambilan SK komprenya, Leni,Vivin, Diana dll.
13. Teman-teman SMU N.I Lahat, Desi, Tati, makasih atas doa kalian, akhirnya ovonk jadi sarjana jugo.
14. Buat teman-teman kostanku, Gesti, Elsa, mas Edi, makasih buat kebersamaannya selama ini, kalo ovonk ado salah tolong dimaafke,ok?!!!!! Jaya Indah The Best……..
15. Buat Rental Jaya Com, kak Yono, makasih banyak atas bantuan ngetiknya, moga Allah bisa ngebalas semua kebaikan kakak.

Indralaya,2006

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Mereka yang berperan dalam kuliahku dan penulisan skripsiku :

- Papa dan Mama tersayang, pa, ma, makasih ya atas bantuan material dan spritualnya, akhirnya kami bertiga jadi sarjana. Tanpa kasih sayang dan dorongan dari kalian mungkin kami tidak akan berhasil. *Papa dan mama is The Best*... ... .

- Untuk Ayundaku (Iing) dan kakakku (Andrey), makasih atas doa dan semangat kalian, akhirnya ovonk jadi sarjana jugo!Tinggal begawenyo ye dak yuk? Moga kita bisa membahagiakan mama dan papa, amin!!!!!*we are Ryan's Family*... ...

- Buat Teman-teman kuliahku yang paling spesial, Nana, thank's banget buat tim suksesnya, curhatnya, bantuan dan segalanya. Moga Allah bisa membalasnya, Akhirnya aku biso nyusul kalian. Aku harap kita tetap jadi My Best friend 4 Ever, ok? Tetap Semangat.....!!!!

- Buat Uni Lia, makasih atas doanya dan semangatnya, salam untuk amak, papa, yuk oviet, Era, Eni dan Yuk Neri. Kita akan tetap jadi seperti keluarga selamanya. Persahabatan itu lebih indah dari segalanya.

- Teman Sejatiku, a' makasih atas segala bantuannya dan keikhlasannya, dari awal skripsi sampe wisudanyo, segala cobaan dan rintangan alhamdulillah biso dilalui dengan kesabaran, doa dan kedewasaanya!A' makasih jugo sudah biso jago ovonk, nuntun dan semuanya, mudah-mudahan ovonk biso berubah, ovonk cuma biso kasih doa, moga a' dapet yang terbaik dan bisa jadi yang terbaik, kita akan

tetap jadi keluarga selamanya!!!ovonk dak biso bales apo-apo, "Hanya kembali pada Allah" karena hidup tak selalunya indah, ye dak a' nop?????

- Buat Depisari , Spd, cak akhirnya ovonk biso selesai jugo. Makasih atas doanya, semoga kita akan jadi keluarga selamanya, salam untuk mama, papa, deci dan adek deti. Cak, jadilah guru yang baek ye, biar siswanyo seneng!!!!

- Buat Devi Citra, SE, dev, makasih banyak dah bantu ovonk nyelesaike skripsi dan pinjaman skripsinyo akhirnyo selesai galo gawe tu, maaf aku belum biso ngebales apo-apo, yang jelas makasih banyak.....nian !!!

- Buat Ema, aku dak pernah lagi dapet kabarmu ma, dan buat Mira selamat ya atas kelahiran babynya, moga bisa jadi orang tua yang baik dan dewasa.

- Untuk Boen, meme dan ovi, makasih banyak ya pinjaman komputernya.

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL x

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Perumusan Masalah 5

1.3. Tujuan Manfaat Penelitian .....

1.3.1. Tujuan Penelitian 6

1.3.2. Manfaat Penelitian 7

1.4. Kerangka Pemikiran 7

1.5. Metodologi Penelitian 10

1.5.1 Ruang Lingkup Pembahasan 10

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 11

1.5.3 Teknik Analisis Data 11

1.6. Sistematika Pembahasan 15

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Rasio Keuangan 17

2.1.1. Definisi Rasio Keuangan 17

2.1.2. Keuangan dan Keterbatasan Analisis Rasio 17

2.1.3. Analisis Rasio Keuangan pada Perusahaan Swasta 19

2.1.4. Karakteristik Pengelolaan Keuangan Daerah 20

2.1.5. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 22
2.1.6. Perbedaan Pokok Keungan Daerah Diera Reformasi dan Era (pasca) Reformasi 24
2.1.7. Hubungan Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah dalam Rerangka Otonomi Daerah 26
2.1.8. Analisis Rasio Keuangan pada APBD 27
2.2. Konsep Anggaran 34
2.2.1. Definisi Anggaran 34
2.2.2. Kebaikan dan Kelemahan Anggaran 35
2.2.3. Pentingnya Anggaran Sektor Publik 36
2.2.4. Karakteristik Anggaran Sektor Publik 36
2.2.5. Fungsi Anggaran Sektor Publik 37
2.2.6. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik 39
2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) 40
2.3.1 Prinsip-prinsip Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD 40
2.3.2 Struktur APBD 42
2.3.3 Proses Penyusunan APBD 44
2.3.4 Proses Penetapan APBD 47
2.3.5 Perhitungan dan Pertanggungjawaban APBD/Keuangan Daerah 49

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN LAHAT

3.1. Sejarah Umum Kabupaten Lahat 52
3.1.1 Fisik Wilayah 52
3.1.2 Kondisi Sosial Budaya 53
3.2. Struktur Organisasi 61
3.3. Visi, Misi dan Rencana Strategis 79

3.3.1. Visi 79
3.3.2. Misi 79
3.3.3. Rencana Strategis 79
3.4. Kondisi Keuangan (APBD) Pemerintah Kabupaten Lahat 81

BAB IV ANALISIS KEUANGAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

4.1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 94
4.2. Analisis Efektivitas dan Pendapatan Asli Daerah 98
4.2.1. Rasio Efektivitas 98
4.2.2. Rasio Efisiensi 101
4.3. Analisis Rasio Keserasian 104
4.4. Rasio Pertumbuhan 109
4.5. Analisis Debt Service Coverage Rasio (DSCR) 113
4.6. Analisis Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan dalam Pembentukan Pendapatan Daerah 116

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan 122
6.2. Saran-saran 124

DAFTAR PUSTAKA

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : 050734
TANGGAL : 13 JUN 2006

DAFTAR TABEL

Table 2.1. Perbedaan Antara Keuangan Daerah Diera Reformasi Dan Keuangan Daerah Diera (Pasca) Reformasi 25

Tabel 3.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Lahat Tahun 2003 54

Tabel 3.2. Kondisi Pendidikan Di Kabupaten Lahat 56

Tabel 3.3 Ringkasan Perhitungan APBD Pemda Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 1999 82

Tabel 3.4. Ringkasan Perhitungan APBD Pemda Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2000 83

Tabel 3.5. Ringkasan Perhitungan APBD Pemda Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2001 84

Tabel 3.6. Ringkasan Perhitungan APBD Pemda Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2002 85

Tabel 3.7. Ringkasan Perhitungan APBD Pemda Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2003 86

Tabel 3.8. Laporan Perhitungan APBD Pemda Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2004 87

Tabel 3.9. Neraca Pemda Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2004 90

Tabel 3.10 Laporan Arus Kas Pemda Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2004 91

Tabel 3.11. Ringkasan APBD Pemda Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 1999-2003 92

Tabel 4.1. Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 1999-2004 95

Tabel 4.2. Perhitungan Rasio Efektifitas Tahun Anggaran 1999-2004 99

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 1999-2004 102

Tabel 4.4. Perhitungan Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Tahun Anggaran 1999-2004 105

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD Tahun Anggaran 1999-2004 106
Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Keserasian Terhadap APBD Tahun Anggaran 1999-2004 106
Tabel 4.7. Rasio Pertumbuhan APBD Pemkab Lahat Tahun Anggaran 1999-2004 110
Tabel 4.8. Perhitungan (DSCR) Tahun Anggaran 1999-2004 114
Tabel 4.9. Kontribusi Sumber Pendapatan Dalam Pembentukan Pendapatan Daerah 117
Tabel 4.10. Perhitungan Kontribusi Sumber Pendapatan Dalam Pembentukan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999-2004 118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan ketidaktanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan serta ketidakselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasinya kegiatan pelayanan masyarakat, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan diberbagai daerah.

Ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, kurangnya kemandirian daerah dan munculnya ketidakpuasan masyarakat didaerah. Disamping itu, krisis ekonomi yang terjadi telah mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom.

Sejak diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Lahat mengalami pemekaran dengan kota administratif Pagaralam pada tahun 2001 sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka kota administratif Pagaralam berubah menjadi Kota Pagaralam

setelah mengalami pemisahan dengan Kabupaten Lahat. Pemerintah Kabupaten Lahat diberi kekuasaan untuk melaksanakan dan mengatur sendiri keuangan daerahnya.

Reformasi keuangan daerah ditandai dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menggantikan UU No.25 tahun 1999 dan UU No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan UU No.32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dan daerah-daerah yang mengurusi rumah tangganya sendiri. Keuangan daerah diera pra reformasi dan era (pasca) reformasi memiliki ciri yang berbeda.

Konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah lebih jauh dijabarkan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu dijabarkan pula melalui PP Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dari ketiga PP tersebut secara asas pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya sebagai salah satu wujud dari otonomi suatu daerah.

Dengan hembusan reformasi yang masih berlangsung, tuntutan pemberian otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah menjadi semakin kuat. Tuntutan itu menyangkut pula tuntutan terhadap perimbangan keuangan antara pusat dan

daerah yang lebih diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan kesejahtaraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim, 2002:24). APBD yang dipresentasikan di DPRD dan di masyarakat sesuai dengan program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dan bagaimana program-program itu dibiayai.

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan puast dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekosentrasi dan dana desentralisasi. Dana dekosentrasi berbentuk dana bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan dana desentralisasi adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah

dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan keuangan pada APBD. Analisis ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas diterapkan pada lembaga perusahaan yang komersial, sedang pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Hal itu karena :

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan daerah yang sifat cakupanya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersil.
2. Selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan perimbangan *incremental budget* yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah prosentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Oleh karena disusun dengan pendekatan secara *incremental* maka seringkali mengabaikan bagaimana rasio keuangan dalam APBD. Misal adanya prinsip "yang penting pendapatan naik meskipun untuk menaikkan itu diperlukan biaya yang tidak efisien".

   Menurut pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 105, APBD seharusnya disusun dengan pendekatan (*performance budget*).
3. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target,

sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBDnya.

Bertitik tolak dari uraian, maka skripsi ini diberi judul **"Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten Lahat Sebelum dan Sesudah Pemekaran sebagai alat untuk Menilai Kinerja PEMDA dalam Mengelola Keuangan Daerahnya."**

1.2. Perumusan Masalah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang –undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim,2002 :127).

Dari uraian, permasalahan yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat dalam Mengelola Keuangan Daerahnya Sebelum dan Sesudah Pemekaran dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebagai tolok ukurnya ?
2. Faktor-faktor apa saja yang membedakan pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara pemecahan masalah yang digunakan dalam ilmu pengetahuan disamping untuk melihat perbedaan teori dengan kenyataan dan selanjutnya menggunakan prinsip-prinsip dan metode secara sistematis dalam mengumpulkan data secara objektif.

Maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Menilai kemandirian daerah Pemerintah Kabupaten Lahat dalam membiayai penyelenggaraan daerah.
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam merealisasikan pendapatan daerahnya.
3. Mengukur sejauh mana aktivitaas Pemerintah Kabupaten Lahat dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalm pembentukan pendapatan daerah Kabupaten Lahat.

5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat selama beberapa periode.
6. Membandingkan analisis rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat sebelum dan sesudah pemekaran.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat seperti :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan penulis melalui perbandingan antara pengetahuan yang diperoleh penulis selama di bangku kuliah dengan realita yang ada dimasyarakat.
2. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi untuk keadaan yang memenuhi kriteria yang sama dan memberikan pemikiran baru bagi penulis lainnya.
3. Memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu pihak Badan Keuangan daerah Kabupaten Lahat.

1.4. Kerangka Pemikiran

Menurut Sofyan Syafri Harahap (1998 : 297) definisi Rasio Keuangan adalah "Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan."

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaedah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio daerah lainnya yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Rasio keuangan APBD adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pemerintah yang

dinyatakan dalam satuan uang yang meliputi rencana pengeluaran dan rencana pemenuhan pengeluaran tersebut.

Adapun beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi.
3. Debt Service Coverage Ratio.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial yang menyatakan (Mardiasmo,2002 : 61-62):

1. Berapa biaya atas rencana yang dibuat (pengluaran, belanja)
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilisator antara pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk angka yang menunjukkan adanya sumber yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Karena biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),maka pengarahan

wewenang pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada didaerah, disamping itu didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

I.5 Metodologi Penelitian

I.5.I. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan sehingga menjadi terarah dan tidak menyimpang dari masalah-masalah yang dihadapi, maka penulis memberikan batasan-batasan dalam penulisan skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pada masalah-masalah yang ada hubungannya dengan judul skripsi. Ruang lingkup yang dibahas didasarkan pada data yang terdapat pada perhitungan APBD Kabupaten Lahat tahun Anggaran 1999 sampai dengan Tahun Anggaran 2004.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan data yang relevan guna mendukung analisis penelitian, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Studi lapangan

   Metode ini untuk mendapatkan data primer, yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang melalui:

   a. Wawancara

      Data dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

   b. Dokumentasi

      Yaitu mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dari arsip bagian keuangan dan administrasi.

2. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur yang relevan dengan permaslahan yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori.

I.5.3. Tehnik Analisis Data

Untuk menganalis masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya digunakan dua alat analisis, yaitu :

1. Analisis Kuantitatif

Tehnik ini dilakukan dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh melalui perhitungan empiris (rumusan) maupun keuangan. Penulis menggunakan beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Lahat tahun anggaran 1999 sampai tahun anggaran 2004.

Rasio-rasio yang digunakan antara lain :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan masyarakat.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanaknan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio ini perlu disandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

3. Rasio keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan secara optimal.

Secara sederhana, rasio keserasian itu diformulasikan sebagai barikut :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

DSCR adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjamannya dan penentuan mengenai batas maksimal angsuran pokok pinjaman yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah.

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan *(Growth Ratio)* mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan menigkatkan keberhasilan yang tealah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

6. Mengukur Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan dalamPembentukan Pendapatan Daerah

$$\text{Kontribusi Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{KontribusiDana Perimbangan} = \frac{\text{RealisasiDana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Kontribusi Pinjaman Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pinjaman Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Kontribusi Lain - lain Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi lain - lain Pendapatan}}{\text{Total pendapatan}}$$

2. Analisis Kualitatif

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan teori-teori yang bersifat umum yang dijadikan kerangka berfikir dibandingkan dengan fakta yang sesungguhnya

dihadapi. Dengan cara kualitatif, penulis akan mengumpulkan, menyusun, dan megevaluasi serta menginterprestasikan data yang diperoleh kemudian akan ditarik kesimpulan.

I.6 Sistematika Pembahasan

Untuk keteraturan dalam penulisan dan agar lebih mudah mengetahui isi dari skripsi ini, maka pembahasannya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan apa yang menjadi latar belakang atas dipilihnya judul skripsi ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang konsep rasio keuangan, karakteristik pengelolaan keuangan daerah, konsep anggaran, karakteristik anggaran sektor publik, penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja, pengelolaan keuangan daerah (APBD), prinsip-prinsip penyusunan dan bentuk APBD, struktur APBD, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

Dalam bab ini dijabarkan mengenai sejarah umum Kabupaten Lahat, struktur organisasi, visi, misi, kondisi keuangan pada APBD Kabupaten Lahat.

BAB IV ANALISIS RASIO PADA APBD PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

Pada bab ini penulis akan menjabarkan analisis rasio pada APBD Kabupaten Lahat sebagai suatu alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dan menghubungkannya dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil pengolahan dan penganalisaan data yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Akhirnya sebagai masukan, penulis juga mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat guna membenahi kekurangan-kekurangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Amirullah, ***Penilaian Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Membiayai Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Menggunakan Teknik Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Pemerintah Kota Pangkalpinang***, skripsi akuntansi, 2004.

Bastian, Indra, ***Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia***, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2001.

————, ***Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah,*** Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2001.

Devi, ***Studi Perbandingan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dearah Dalam Meningkatkan Kenerja Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi Kasus Pada Pemkot Pagar Alam Dengan Pemkot Prabumulih)*** Skripsi Akuntansi, 2005.

Fitriah, ***Analisa Perbandingan Rasio Keuangan Pada APBD Pemkot Pangkalpinang dan Palembang sebagai Tolak Ukur Dalam Menilai Kemandirian Keuangan Daerah Membiayai Penyelenggaraan Otonomi Daerah,*** Skripsi Akuntansi, 2004

Halim, Abdul, ***Akuntasi dan Pengendalian Keuangan Daerah,*** Penerbit (UUP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.

----------, ***Akuntansi Sektor Publik -Akuntansi Keuangan Daerah,*** Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002

Harahap, Sofyan Syafri, ***Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan,*** Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Kuntadi, Cris, ***Akuntansi Sektor Publik dan Karakteristik Khusus Akuntansi Pemerintahan,*** Makalah Akuntansi Keuangan Daerah, Pelatihan dan Pengenalan Akuntansi Keuangan Daerah, 2003.

Mardiasmo, ***Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama,*** Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat, ***Monografi dan Renstra Kabupaten Lahat,*** 2004.

Sartono, Agus, ***Ringkasan Teori Manajemen Keuangan,*** Penerbit BPFE-UGM, Yogyakarta, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dearah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Yani, Ahmad, ***Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,*** Seri Keuangan Publik, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, Jakarta, 2002.